

**SURAT PERJANJIAN  
PENGADAAN KENDARAAN AMBULANCE DAN RESCUE  
RUAS MEDAN - KUALANAMU**

---

**Nomor : 30.../SP-JLO/VIII/2017**

Pada hari ini, Kamis tanggal tiga puluh satu, bulan agustus, tahun dua ribu tujuh belas (31-08-2017), kami yang bertanda tangan di bawah ini:

I. Nama : **Saut Sitorus**  
Jabatan : Vice President Operation Management  
Alamat : Plaza Tol Taman Mini Indonesia Indah  
Kantor cabang Jagorawi Lt 4  
Jakarta 13550

Berdasarkan ketentuan Pasal 12 ayat 9 (a) Akta Pendirian Perseroan No. 07 tanggal 21 Agustus 2015 yang dibuat oleh dan dihadapan Rina Utami Djauhari, SH Notaris di Jakarta Selatan dan telah disahkan oleh Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia dengan Surat Keputusan nomor AHU-2452733.AH.0101. tahun 2015 tanggal 25 Agustus 2015 dengan akta perubahan No. 11 tanggal 23 Desember 2015 yang dibuat oleh dan dihadapan Rina Utami Djauhari, SH Notaris di Jakarta Selatan dan telah disahkan oleh Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia dengan Surat Keputusan nomor AHU-0948744..AH.0102. tahun 2015 tanggal 23 Desember 2015 beserta perubahan – perubahannya, dengan demikian berwenang bertindak untuk dan atas nama PT Jasa Layanan Operasi, yang selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.

II. Nama : **Wiyono Minarno**  
Jabatan : Direktur  
Alamat : Jl. Abdul Muis No.8 L.1 R.111  
Jakarta Pusat Indonesia 10160

Berdasarkan ketentuan Pasal 12 ketentuan Akta Pendirian Perseroan nomor 43 tanggal 10 Desember 2013 yang dibuat oleh dan dihadapan Raden Mas Soediarto Soenarto, S.H., SpN Notaris di Jakarta dan telah disahkan oleh Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : AHU-10666.AH.01.01 Tahun 2014 tanggal 11 Maret 2014 dengan demikian berwenang bertindak untuk dan atas nama PT Resqtec Indonesia ,yang selanjutnya disebut "**PIHAK KEDUA**".

**PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama selanjutnya disebut "**PARA PIHAK**", berdasarkan :

1. Surat Penawaran Harga **PIHAK KEDUA** Nomor : SP-JLO.M.01.VIII.2017 tanggal 02 Agustus 2017 beserta seluruh lampiran-lampirannya ("Surat Penawaran").

2. Berita Acara Negosiasi Nomor 161/BA-JLO/VIII/2017 tanggal 04 Agustus 2017 beserta seluruh lampiran-lampirannya ("Berita Acara Negosiasi")
3. Surat Penunjukan Pelaksana Pengadaan Kendaraan Ambulance dan Rescue nomor : 150/AC/PL.03/2017 tanggal 18 Agustus 2017 ("Surat Penunjukan").

telah setuju dan sepakat untuk mengadakan suatu Perjanjian Pengadaan Pekerjaan Sewa Kendaraan Ambulance dan Rescue Ruas Medan – Kualanamu yang dioperasikan oleh PT Jasa Layanan Operasi (untuk selanjutnya disebut "**Perjanjian**") dengan syarat-syarat dan ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1  
**LINGKUP PEKERJAAN**

1. **PIHAK PERTAMA** dalam kedudukannya seperti tersebut di atas memberi tugas kepada **PIHAK KEDUA** dan **PIHAK KEDUA** menyatakan menerima tugas dan kewajiban dari **PIHAK PERTAMA** untuk melaksanakan Pengadaan Kendaraan Ambulance dan Rescue Ruas Medan - Kualanamu (selanjutnya disebut "Pekerjaan"), dengan jumlah dan spesifikasi sebagaimana tercantum dalam Spesifikasi Teknis (Buku III) dan Daftar Harga Satuan.
2. Lingkup pelaksanaan Pekerjaan dimaksud ayat 1 adalah termasuk penunjukan dan pemberian tugas dan tanggung jawab dari **PIHAK PERTAMA** kepada **PIHAK KEDUA** untuk menyediakan Kendaraan Ambulance dan Rescue yang disewa oleh **PIHAK PERTAMA** sesuai dengan jumlah, dengan spesifikasi pekerjaan, tata cara pelaksanaan pekerjaan dan ketentuan-ketentuan lainnya sebagaimana tercantum dalam Ketentuan Umum Kontrak.
3. **PIHAK KEDUA** bertanggungjawab atas pelaksanaan Pekerjaan yang telah diterima dari **PIHAK PERTAMA** sesuai dengan ketentuan yang telah ditegaskan dalam Perjanjian ini.
4. **PIHAK KEDUA** dengan cara apapun tidak diperkenankan mengalihkan dan memberikan Pekerjaan yang telah diterima dari **PIHAK PERTAMA** baik sebagian maupun keseluruhan dari apa yang telah ditentukan dalam Perjanjian ini kepada pihak lain tanpa persetujuan **PIHAK PERTAMA**.

Pasal 2  
**DASAR PELAKSANAAN PEKERJAAN**

Pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Perjanjian ini harus dilaksanakan sesuai dan tidak bertentangan dengan ketentuan-ketentuan yang ada pada :

1. Dokumen Pengadaan yang meliputi:
  - a. Instruksi Kepada Penawar;
  - b. Ketentuan Umum Kontrak;
  - c. Spesifikasi Pekerjaan;
  - d. Rancangan Surat Perjanjian Pekerjaan;
  - e. Addendum Dokumen Pengadaan (jika ada).

2. Berita Acara Hasil Negosiasi;
3. Peraturan – peraturan teknis dan non teknis yang dikeluarkan oleh PT Jasa Layanan Operasi;

Pasal 3  
**LOKASI**

1. Pekerjaan yang dimaksud dalam pasal 1 di atas digunakan di ruas Medan – Kualanamu – Tebing tinggi yang dioperasikan oleh PT Jasa Layanan Operasi
2. **PIHAK KEDUA** akan melaksanakan Pekerjaan untuk **PIHAK PERTAMA**, sesuai dengan jumlah dan jenis yang telah ditentukan didalam spesifikasi pekerjaan, yang diserahkan kepada wakil **PIHAK PERTAMA**
3. Dalam hal terbukti pada saat pemeriksaan untuk serah terima pekerjaan, ternyata terbukti bahwa kendaraan yang diserahkan tidak sesuai dengan yang tercantum dalam kesepakatan spesifikasi pekerjaan, maka **PIHAK KEDUA** wajib mengganti barang tersebut sesuai dengan jumlah dan kwalitas yang diminta /dipesan oleh **PIHAK PERTAMA**.
4. Dalam Hal **PIHAK KEDUA** tidak dapat memenuhi ketentuan ayat 3 Pasal ini, maka **PIHAK PERTAMA** tidak akan membayar nilai barang tersebut, dan untuk selanjutnya **PIHAK KEDUA** tidak diijinkan mengikuti Pengadaan Barang dan Jasa di lingkungan Perusahaan **PIHAK PERTAMA**.

Pasal 4  
**JANGKA WAKTU PELAKSANAAN PENYEDIAAN KENDARAAN**

1. Jangka waktu pelaksanaan penyediaan Kendaraan Ambulance dan Rescue Ruas Medan – Kualanamu – Tebing tinggi sebagaimana dimaksud pasal 1 Perjanjian ini adalah maksimal 7 (tujuh) hari kerja, terhitung sejak diterbitkannya Surat Penunjukan.
2. Seluruh pelaksanaan pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 ini harus diselesaikan dan diserahkan oleh **PIHAK KEDUA** kepada **PIHAK PERTAMA** dengan hasil yang memuaskan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 Pasal ini dan dituangkan dalam Berita Acara Serah Terima Pekerjaan.
3. Apabila **PIHAK KEDUA** tidak dapat menyelesaikan penyerahan Kendaraan Ambulance sesuai dengan ketentuan ayat 1 pasal ini maka **PIHAK KEDUA** dikenakan denda sebesar 1/1000 (satu per seribu ) dari nilai kontrak untuk setiap hari keterlambatan atau dengan denda maksimal sampai 30 hari
4. Besarnya denda tersebut akan diperhitungkan oleh **PIHAK PERTAMA** pada saat pembayaran tahap pertama

5. Denda yang dikenakan oleh **PIHAK PERTAMA** kepada **PIHAK KEDUA** tidak membebaskan **PIHAK KEDUA** dari kewajiban untuk menyelesaikan seluruh pekerjaan sebagaimana tersebut dalam Pasal 1.
6. Apabila jangka waktu maksimal sebagaimana dimaksud ayat 3 Pasal ini telah dilampaui oleh **PIHAK KEDUA** maka **PIHAK PERTAMA** secara sepah dan tanpa adanya tuntutan apapun dari **PIHAK KEDUA** berhak mencabut dan membatalkan Perjanjian ini, dan Jaminan Pelaksanaan menjadi milik **PIHAK PERTAMA**.
7. Apabila dalam jangka waktu dimaksud ayat 1 pasal ini **PIHAK KEDUA** belum memulai pelaksanaan Pekerjaan, maka **PIHAK PERTAMA** berhak mencabut dan membatalkan Surat Perjanjian ini dan Jaminan Pelaksanaan menjadi milik **PIHAK PERTAMA**.
8. Segala Biaya yang timbul akibat dibatalkannya Surat Perjanjian ini merupakan beban sepenuhnya **PIHAK KEDUA**

Pasal 5  
**JANGKA WAKTU PERJANJIAN**

1. Perjanjian ini berlaku sejak ditandatangani oleh **PARA PIHAK**
2. Jangka Perjanjian ditetapkan selama 36 (tiga puluh enam) bulan, terhitung sejak 01 Oktober 2017 sampai dengan 30 September 2020
3. Jangka waktu sebagaimana ditentukan dalam ayat (1) apabila dikehendaki oleh **PARA PIHAK** dapat diperpanjang untuk jangka waktu tertentu dengan syarat-syarat yang ditetapkan kemudian oleh **PARA PIHAK** dengan pemberitahuan secara tertulis terlebih dahulu dari salah satu PIHAK ke PIHAK lainnya dalam jangka waktu paling lambat 2 (dua) bulan sebelum berakhirnya perjanjian ini.

Pasal 6  
**JAMINAN PELAKSANAAN**

1. Sebelum ditanda tanganinya kontrak maka **PIHAK KEDUA** harus menyerahkan Jaminan Pelaksanaan yang besarnya 5% (lima perseratus) dari nilai kontrak dalam bentuk Bank Garansi
2. Masa berlaku Jaminan Pelaksanaan terhitung sejak ditanda tangani kontrak sampai dengan 31 Desember 2017 ditambah 30 (tiga puluh) hari kalender.
3. Jika terjadi perubahan nilai kontrak dan/atau jangka waktu kontrak, maka **PIHAK KEDUA** melakukan penyesuaian terhadap besarnya nilai dan jangka waktu masa berlakunya jaminan pelaksanaan dimaksud
4. Jaminan Pelaksanaan akan dikembalikan oleh **PIHAK PERTAMA** kepada **PIHAK KEDUA** setelah jangka waktu berakhir ditambah 30 (tiga puluh) hari kalender

**Pasal 7**  
**NILAI KONTRAK**

- Nilai Kontrak Perjanjian ini terhitung mulai dari tanggal 01 Oktober 2017 sampai dengan 31 Desember 2017 dengan nilai sebesar **Rp. 300.000.000,-** (tiga ratus juta rupiah) sudah termasuk PPN 10% dengan perincian sebagai berikut :

No	Uraian Pekerjaan	Vol	bln	Satuan	Harsat	Total harga
1	Sewa Kendaraan Rescue	1	3	Unit	18,753,000	56,259,000
2	Sewa Alat Rescue	1	3	Unit	26,625,000	79,875,000
3	Petugas Kendaraan Rescue	4	3	Orang	4,016,000	48,192,000
4	Perlengkapan Petugas	4	1	set	1,325,320	5,301,280
5	Sewa Kendaraan Ambulance dan Perlengkapannya	2	3	Unit	13,850,000	83,100,000
						Subtotal
						272,727,280
						PPN 10%
						27,272,728
						TOTAL
						300,000,008
						Pembulatan
						300,000,000

- Harga dimaksud pada ayat 1 sudah termasuk biaya yang timbul termasuk tetapi tidak terbatas pada pajak serta merupakan harga pasti (fixed price) dan tidak berubah akibat eskalasi harga, kecuali dikeluarkan kebijakan Pemerintah di Bidang Moneter dan Ketenagakerjaan, maka harga satuan tersebut akan disesuaikan dengan ketentuan pemerintah dengan terlebih dahulu harus mendapat persetujuan dari **PIHAK PERTAMA**.
- Apabila salah satu pihak ingin mengadakan perubahan/penambahan mengenai isi Perjanjian, maka pihak yang bersangkutan harus memberitahukan/menyampaikan maksud tersebut dalam waktu 7 (tujuh) hari sebelumnya kepada pihak lainnya. Perubahan/tambahan tersebut baru berlaku sah apabila telah disetujui kedua belah pihak dan dituangkan dalam suatu Perjanjian tambahan/addendum.
- Nilai Kontrak sebagaimana dimaksud ayat 1 pasal ini untuk periode tahun selanjutnya akan disepakati kembali oleh **PARA PIHAK** selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kalender sebelum akhir periode

Pasal 8

### **TATA CARA PEMBAYARAN**

1. Pembayaran dilakukan melalui Bendahara Kantor PT Jasa Layanan Operasi dengan cara ditransfer dan dilaksanakan setiap bulan setelah pekerjaan selesai sebesar **Rp. 100.000.000,-** (seratus juta rupiah) sudah termasuk PPN 10% dengan ketentuan sebagai berikut:
  - 1.1. Nilai tagihan perbulan sesuai dengan realisasi pelaksanaan pekerjaan yang dilaporkan dalam Berita Acara Laporan Pelaksanaan Pekerjaan
  - 1.2. Pembayaran tersebut pada ayat 1 pasal ini dilaksanakan selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja sejak semua dokumen pembayaran diterima oleh **PIHAK PERTAMA** secara benar dan lengkap;
2. Untuk memperoleh pembayaran sebagaimana tersebut ayat 1 Pasal ini, **PIHAK KEDUA** harus mengajukan Surat permohonan pembayaran kepada **PIHAK PERTAMA** dengan kwitansi asli bermaterai cukup.
3. **PIHAK PERTAMA** akan memotong Pajak-Pajak kepada **PIHAK KEDUA** pada setiap tahapan pembayaran yang diberikan oleh **PIHAK PERTAMA** sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku.

Pasal 9

### **PENYERAHAN PEKERJAAN**

1. **PIHAK KEDUA** menyerahkan Kendaraan Ambulance, Rescue dan Petugas Rescue kepada **PIHAK PERTAMA**.
2. Penerimaan data tersebut pada ayat 1 pasal ini dinyatakan dalam Berita Acara Serah Terima Pekerjaan.
3. **PIHAK KEDUA** wajib menyerahkan kepada **PIHAK PERTAMA** dokumen kelengkapan kendaraan Ambulance dan Rescue secara lengkap yang akan dipekerjakan di tempat **PIHAK PERTAMA**

Pasal 10

### **PENGGUNAAN KENDARAAN DAN JAMINAN PEMILIKAN**

1. Kendaraan yang dimaksud dalam pasal 1 akan digunakan oleh **PIHAK PERTAMA** untuk kebutuhan Ambulance dan Rescue ruas Medan – Kualanamu yang dioperasikan oleh PT Jasa Layanan Operasi
2. Jaminan kepemilikan :
  - 2.1. **PIHAK KEDUA** dengan ini menjamin bahwa kendaraan yang disewakan kepada **PIHAK PERTAMA** adalah milik **PIHAK KEDUA** dan **PIHAK KEDUA** membebaskan serta melindungi **PIHAK PERTAMA** dari segala tuntutan yang timbul sehubungan dengan tuntutan tersebut;

- 2.2. Gugatan atau tindakan hukum yang timbul karena penggunaan kendaraan tersebut akan menjadi beban dan tanggung jawab **PIHAK KEDUA**;
- 2.3. Terhadap setiap kendaraan yang tersangkut gugatan sehingga tidak dapat digunakan oleh **PIHAK PERTAMA, PIHAK KEDUA** akan menyediakan kendaraan pengganti dengan spesifikasi yang sama.

Pasal 11

**KENDARAAN PENGGANTI**

1. Kendaraan Pengganti yang diserahkan oleh **PIHAK KEDUA** kepada **PIHAK PERTAMA** harus sesuai dengan spesifikasi kendaraan yang diganti serta kelengkapan lainnya.
2. Kendaraan Pengganti diserahkan oleh **PIHAK KEDUA** kepada **PIHAK PERTAMA** apabila kendaraan yang disewa **PIHAK PERTAMA** mengalami :
  - 2.1. Kehilangan;
  - 2.2. Kecelakaan;
  - 2.3. Kerusakan serta kejadian lainnya sehingga tidak dapat dioperasikan oleh **PIHAK PERTAMA**
- 2.4. **PIHAK KEDUA** menyerahkan kendaraan pengganti setelah kedua belah pihak membuat Berita Acara yang di tandatangani kedua belah pihak.
- 2.5. Pengembalian Kendaraan Pengganti dari **PIHAK PERTAMA** kepada **PIHAK KEDUA** menggunakan formulir yang ditandatangani oleh kedua belah pihak.

Pasal 12

**PEMELIHARAAN KENDARAAN**

1. **PIHAK KEDUA** melaksanakan pemeliharaan secara periodik terhadap kendaraan yang disewa oleh **PIHAK PERTAMA** berdasarkan jadwal pemeliharaan yang telah disetujui oleh kedua belah pihak.
2. Pelaksanaan pemeliharaan dalam ayat 1 pasal ini meliputi kendaraan serta kelengkapannya.
3. Pemeliharaan Kendaraan serta kelengkapannya dilakukan di lokasi **PIHAK PERTAMA** dan bila dilakukan di luar lokasi **PIHAK PERTAMA** harus dengan persetujuan **PIHAK PERTAMA**.
4. Untuk pelaksanaan pemeliharaan serta kelengkapannya yang dilakukan diluar lokasi **PIHAK PERTAMA, PIHAK KEDUA** diwajibkan menunjuk bengkel pemeliharaan kendaraan yang beroperasi dari hari Senin sampai dengan hari Minggu yang berada di lokasi **PIHAK PERTAMA**.

Pasal 13

### **ASURANSI PETUGAS RESCUE**

1. Selama masa jangka waktu Perjanjian **PIHAK KEDUA** wajib untuk mengasuransikan secara terus menerus tenaga yang bekerja dalam kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan sesuai perundungan yang berlaku.
2. Bilamana **PIHAK KEDUA** lalai dalam hal kewajiban mengasuransikan dan atau membayar ganti rugi tersebut di atas atau asuransi/ganti rugi lainnya yang diperlukan untuk pelaksanaan pekerjaan, maka **PIHAK PERTAMA** dapat memaksakan dengan cara membayarkan premi asuransi/ganti rugi yang seharusnya dilakukan oleh **PIHAK KEDUA** dan setiap saat dapat memotong jumlah pembayaran kepada **PIHAK KEDUA** sebesar dan sebagai pengganti jumlah yang dibayarkan untuk premi asuransi/ganti rugi tadi

Pasal 14

### **TANGGUNG JAWAB DAN KEWAJIBAN**

**PIHAK KEDUA** melaksanakan Pekerjaan sesuai dengan ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian ini sebagai berikut :

1. Apabila terjadi kehilangan dari salah satu peralatan medis yang terdapat di kendaraan Ambulance menjadi tanggung jawab petugas **PIHAK PERTAMA** selaku petugas paramedis.
2. Kehilangan peralatan medis akan diganti oleh **PIHAK PERTAMA** dengan cara mengganti dengan barang dan tipe yang sama.
3. Apabila terdapat kepastian bahwa Pekerjaan tersebut oleh **PIHAK KEDUA** dialihkan/diserahkan kepada pihak lain maka **PIHAK PERTAMA** setelah memberikan peringatan secara tertulis, **PIHAK KEDUA** harus mengembalikan keadaan sesuai dengan Perjanjian yang telah disepakati.
4. Apabila ternyata dalam waktu yang telah ditentukan oleh **PIHAK PERTAMA** surat peringatan tidak diindahkan, maka setelah diadakan perhitungan dari Pekerjaan yang telah dilaksanakan, **PIHAK PERTAMA** berhak membatalkan Perjanjian
5. **PIHAK PERTAMA** tidak dapat dibebani biaya apapun oleh **PIHAK KEDUA** atas kejadian terhadap Kendaraan Sewa antara lain :
  - 6.1. Kendaraan hilang;
  - 6.2. Kendaraan mengalami kecelakaan sehingga rusak;
  - 6.3. STNK asli hilang;

Atas kejadian dimaksud ayat ini, maka **PIHAK PERTAMA** sesuai dengan kemampuan yang ada wajib membantu **PIHAK KEDUA** dalam mempersiapkan atau menerbitkan Surat-Surat (keterangan kehilangan, keterangan kecelakaan) atas biaya **PIHAK KEDUA**.

6. **PIHAK PERTAMA** akan menunjuk wakilnya setingkat Assistant Vice President yang akan bertindak sebagai wakil **PIHAK PERTAMA** dalam teknis pelaksanaan Perjanjian ini.

Pasal 15  
**ASURANSI KENDARAAN**

1. Selama masa perjanjian ini atau perpanjangan, **PIHAK KEDUA** wajib mengasuransikan masing-masing kendaraan yang diserahkan menurut Perjanjian ini terhadap kerusakan, pencurian dan kerugian (all risk insurance) dalam jumlah yang tidak kurang dari harga masing-masing kendaraan tersebut termasuk tetapi tidak terbatas terhadap kejadian-kejadian gempa bumi dan huru-hara.
2. Dalam asuransi ini **PIHAK PERTAMA** juga menyatakan sebagai pihak yang turut tertanggung dengan pembebasan hak subrograsi terhadap **PIHAK PERTAMA**. **PIHAK KEDUA** akan menanggung jumlah pertama yang tidak dibayarkan asuransi (deductible);
3. Diasuransikan atau tidaknya kendaraan tersebut oleh **PIHAK KEDUA** sesuai dengan ketentuan di atas, tidak mengurangi atau melindungi serta membebaskan **PIHAK PERTAMA** dari segala tanggung jawab atas gugatan atau tindakan hukum yang timbul karena adanya kerugian atau kerusakan atas kendaraan tersebut diatas dan atas kerugian yang dialami Pihak Ketiga.
4. Bilamana **PIHAK KEDUA** lalai dalam hal kewajiban mengasuransikan dan atau membayar ganti rugi tersebut di atas atau asuransi/ganti rugi lainnya yang diperlukan untuk pelaksanaan pekerjaan, maka **PIHAK PERTAMA** dapat memaksakan dengan cara membayarkan premi asuransi/ganti rugi yang seharusnya dilakukan oleh **PIHAK KEDUA** dan setiap saat dapat memotong jumlah pembayaran kepada **PIHAK KEDUA** sebesar dan sebagai pengganti jumlah yang dibayarkan untuk premi asuransi/ganti rugi
5. **PIHAK PERTAMA** akan menunjuk wakilnya setingkat Kepala Bagian yang akan bertindak sebagai wakil **PIHAK PERTAMA** dalam teknis pelaksanaan Perjanjian ini.

Pasal 16  
**DENDA DAN SANKSI**

Tanpa mengurangi tanggungjawab dan wewenang yang diberikan kepada **PIHAK KEDUA** berdasarkan Perjanjian ini, **PIHAK KEDUA** harus melaksanakan Pekerjaan sesuai dengan ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian ini dengan konsekuensi sebagai berikut :

1. Apabila **PIHAK KEDUA** lalai melaksanakan pekerjaan selama 3 (tiga) kali berturut-turut, **PIHAK PERTAMA** berhak mengenakan denda sebagai ganti rugi, sebesar 1/1000 (satu perseribu) dari nilai tagihan untuk setiap kali kelalaian dimaksud.
2. Pengenaan denda sebagaimana dimaksud pada butir 1 di atas, akan dilaksanakan oleh **PIHAK PERTAMA** dengan melakukan pemotongan pembayaran tagihan **PIHAK KEDUA**.

3. Apabila terdapat kepastian bahwa Pekerjaan tersebut oleh **PIHAK KEDUA** dialihkan/diserahkan kepada pihak lain maka **PIHAK PERTAMA** setelah memberikan peringatan secara tertulis, **PIHAK KEDUA** harus mengembalikan keadaan sesuai dengan Perjanjian yang telah disepakati.
4. Pengenaan denda sebagaimana dimaksud pada butir 1 di atas, akan dilaksanakan oleh **PIHAK PERTAMA** dengan melakukan pemotongan pembayaran tagihan **PIHAK KEDUA**.
5. Apabila ternyata dalam waktu yang telah ditentukan oleh **PIHAK PERTAMA** surat peringatan tidak diindahkan, maka setelah diadakan perhitungan dari Pekerjaan yang telah dilaksanakan, **PIHAK PERTAMA** berhak membatalkan Perjanjian.
6. Apabila terjadi kejadian sebagaimana dimaksud pada ayat 4 pasal ini, **PIHAK PERTAMA** dapat melakukan pemutusan perjanjian secara sepahik kepada **PIHAK KEDUA**
7. Dalam hal terjadinya kecelakaan, sehingga berakibat kendaraan tersebut mengalami kerusakan, serta munculnya resiko mengganti kerusakan atas kendaraan **PIHAK KEDUA** dan Kendaraan pihak lainnya, maka resiko atas kendaraan tersebut sepenuhnya dibebankan kepada **PIHAK KEDUA**

Pasal 17  
**BERAKHIRNYA PERJANJIAN**

1. Perjanjian ini akan berakhir apabila :
  - 1.1 Diputuskan oleh **PIHAK PERTAMA**;
  - 1.2 Diputuskan oleh **PIHAK KEDUA**;
  - 1.3 Diputuskan oleh **PIHAK PERTAMA** bersama **PIHAK KEDUA**.
  - 1.4 Diputuskan oleh Pemberi Kerja **PIHAK PERTAMA**
3. Pemutusan Perjanjian dapat dilakukan oleh **PIHAK PERTAMA** jika terdapat suatu kepastian bahwa Pekerjaan tersebut oleh **PIHAK KEDUA** telah diberongkan atau dialihkan/diserahkan kepada pihak lain tidak dengan persetujuan **PIHAK PERTAMA** dan atau **PIHAK KEDUA** lalai atau melanggar persyaratan yang telah ditentukan dan disepakati bersama, setelah mendapat peringatan tertulis dari **PIHAK PERTAMA**, 2 (dua) kali berturut-turut dengan selang waktu masing-masing 4 (empat) hari dan pemutusan Kontrak dapat dilakukan dalam waktu 3 (tiga) hari setelah peringatan kedua dikeluarkan.
3. Bila pemutusan Perjanjian dilakukan oleh **PIHAK KEDUA** maka **PIHAK KEDUA** diwajibkan mengganti semua kerugian yang diderita oleh **PIHAK PERTAMA** akibat perbuatan **PIHAK KEDUA** tersebut.
4. Pemutusan Kontrak dilakukan atas persetujuan bersama antara **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** apabila Pekerjaan terpaksa harus dihentikan karena keadaan memaksa (*Force Majeure*).
5. Dalam hal terjadi pemutusan Perjanjian, maka nilai Pekerjaan **PIHAK KEDUA** yang dapat diperhitungkan hanya sampai tahap Pekerjaan yang telah dikerjakan oleh **PIHAK KEDUA**.
6. Apabila pemutusan Perjanjian ini terjadi, maka dan dengan ini **Para Pihak** sepakat

melepaskan ketentuan pasal 1266 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang berlaku di Indonesia.

7. Apabila pemutusan Perjanjian dimaksud ayat 1 pasal ini terjadi maka **PIHAK KEDUA** dengan ini telah melepaskan haknya yang mungkin timbul berdasarkan ketentuan pasal 1267 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHP Perdata).

Pasal 18  
**FORCE MAJEURE**

1. Hal-hal yang secara langsung mempengaruhi Pekerjaan yang terjadi di luar kekuasaan/kemampuan **PIHAK KEDUA**, disebut Force Majeure. Yang termasuk Force Majeure yaitu Bencana Alam (misalnya gempa bumi, banjir), perperangan, pemberontakan, pemogokan.
2. Apabila terjadi Force Majeure, **PIHAK KEDUA** harus membuktikan dan memberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK PERTAMA** selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari setelah terjadinya Force Majeure tersebut.
3. **PIHAK PERTAMA** dapat menyatakan keberatan atau persetujuan dalam waktu 7 (tujuh) hari setelah menerima pemberitahuan tertulis tersebut.
4. Apabila Force Majeure terjadi, kedua belah pihak dapat merundingkan kembali tentang waktu penyerahan Pekerjaan.

Pasal 19  
**PERSELISIHAN**

1. Jika terjadi perselisihan antara **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** maka perselisihan tersebut akan diselesaikan dengan cara musyawarah antara kedua belah pihak.
2. Jika penyelesaian dimaksud ayat 1 tidak dapat dicapai, maka semua sengketa yang timbul dari Kontrak akan diselesaikan berdasarkan prosedur dan tata cara BANI.

Pasal 20  
**TEMPAT KEDUDUKAN DAN DOMSILI**

Sebagai akibat diterbitkannya Kontrak ini, kedua belah pihak sepakat untuk bersama-sama mengambil tempat kedudukan hukum (domisili) yang tetap dan tidak berubah di Kantor Pengadilan Negeri Jakarta Timur.

Pasal 21  
**BEA MATERAI DAN PAJAK-PAJAK**

Bea materai dan pajak-pajak yang timbul akibat adanya Perjanjian ini menjadi tanggung jawab **PIHAK KEDUA**.

Pasal 22  
**PENUTUP**

1. Apabila ada sesuatu yang belum cukup dan belum diatur dalam Perjanjian ini akan ditentukan antara kedua belah pihak dalam bentuk Perjanjian tertulis dan tersendiri yang merupakan bagian integral serta tak terpisahkan dari Perjanjian ini.
2. Perjanjian ini dibuat dan ditandatangani oleh kedua belah pihak di Jakarta pada hari, tanggal, bulan dan tahun tersebut di atas dan dibuat dalam rangkap 2 (dua) dimana rangkap kesatu dan kedua masing-masing dibubuhki meterai tempel Rp 6.000,- dan keduanya mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA  
**PT Resqtec Indonesia**



Wiyono Minarno  
Direktur

PIHAK PERTAMA  
**PT Jasa Layanan Operasi**



Saut Sitorus  
Vice President Operation Management